



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ABIDIN NASYAR**
2. Jabatan : **KETUA**
3. NHK : **664522**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.027.200.000

1. Tanah Seluas 1.515 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI
Rp. 72.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/29 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah Seluas 805 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI
Rp. 20.125.000
4. Tanah Seluas 4.334 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI
Rp. 108.350.000
5. Tanah Seluas 1.615 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI
Rp. 40.375.000
6. Tanah Seluas 765 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI
Rp. 38.250.000
7. Tanah Seluas 1.000 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI
Rp. 50.000.000
8. Tanah Seluas 6.472 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI
Rp. 323.600.000
9. Tanah Seluas 941 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI
Rp. 40.000.000
10. Tanah Seluas 1.753 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI
Rp. 70.000.000
11. Tanah Seluas 125 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI
Rp. 6.500.000
12. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI



Rp. 28.000.000

13. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI

Rp. 30.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 36.000.000

1. MOTOR, KAWASAKI SEPEDA MOTOR RODA 2 Tahun 2017,
HASIL SENDIRI Rp. 17.000.0002. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR RODA 2 Tahun 2018, HASIL
SENDIRI Rp. 19.000.000**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 5.500.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.068.700.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.068.700.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZAENAL MUTIIN
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 656615

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 475.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m²/60 m² di SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m²/200 m² di KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 206.000.000

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOTOR, HONDA REVO Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 200.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 881.000.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 881.000.000

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IDRUS
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 662801

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 100.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 103 m²/100 m² di KOTA SERANG,
HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 250.000.000

1. MOBIL, INNOVA G MANUAL Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 500.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 500.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 351.000.000

III. HUTANG Rp. 150.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 201.000.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZAINAL MUTAQIN
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 664533

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	190.000.000
1. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2019, HASIL SENDIRI	Rp.	20.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA G M/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI	Rp.	170.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	34.710.000
D. SURAT BERTHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	34.318.427
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	259.028.427
III. HUTANG	Rp.	231.021.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	28.007.427

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SITI MARYAM
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 668512

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	191.950.000
1. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2017, HASIL SENDIRI	Rp.	20.950.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA GRAND NEW VELOZ 1,3 A/T TOYOTA/MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI	Rp.	171.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	320.001
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	192.270.001
III. HUTANG	Rp.	62.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	130.270.001

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.